

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Bazar Harahap dan Nawangsuh Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Pecirindo, 2007)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi kedua cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Catharine A. MacKinnon, *Sexual Harassment of Working Woman*, (Yale University Press, 1979)
- Desi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009)
- Djojodigoeno, *Asas-Asas Sosiologis*, (Yogyakarta: Yayasan B. P. Gajah Mada, 1958)
- Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Tahun 2021*, (Karawaci: Universitas Pelita Harapan, 2021)
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K. F. Koehler Verlag, 1975)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013)
- Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Komplexitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2022)
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law (Revised Edition)*, (London: Yale University Press, 1969)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996)
- Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
- Michael Rosen, *Dignity: Its History and Meaning*. (United States of America: Harvard University Press, 2012)
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2009)
- Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*. (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014)
- Nurhasanah Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada)
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996)

- Rabina Yunus, *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial*, (Makassar: Humanities Genius, 2022)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015)

Jurnal

- Anwar, “‘Ini Kan Bukan Bali’: Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigrasi di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan”, *Jurnal Etnosia*, Vol. 01 No. 02 (Desember 2016): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1611>
- Hari Suroto, “Babi dalam Budaya Papua (Pig in The Papua Culture)”, *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014): 37-44. DOI: <https://doi.org/10.24832/papua.v6i1.41>
- Hesti Ratnasari, “Penerimaan Khalayak Terhadap Pertukaran Peran Gender antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Sinetron *Dunia Terbalik* di RCTI”, *Interaksi Online*, Vol. 6, No. 2, (2018): 38-47. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/19651/18635>
- John Griffiths, “What is Legal Pluralism?”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, (1986): 1-55. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Kustrini, “Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2 (September 2015): 80-97. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i2.4224>
- Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia’s Legal System)”, *Jurnal Kanun* Vol. 12, No. 1 (April 2010): 1-13. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285>.
- Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12 No. 01 (2022): 87-96. DOI: <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Woman’s Crisis Center”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 2, (2019): 175-190. DOI: [10.21580/sa.v14i2.4062](https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062)
- Suroto, “Harkat dan Martabat manusia dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 3, (2015): 310-318. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1508>

Hasil Penelitian

- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...Tentang

- Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Naskah Akademik, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2016, “RUU Tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak)”. Naskah Akademik, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pengesahan_asean_convention_againts_trafficking_in_persons.....pdf, 2016
- Leonardus Lenta, “Pandangan Gereja Tentang Trafficking Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia”. Skripsi, Kupang: FFA Unwira, 2007
- Yulita Alexandra Nayoan, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Gereja (Suatu Tinjauan Sosio-Teologis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Gereja di Gereja Masehi Injili di Timor)”. Skripsi, Salatiga: Program Studi Teologi FTEO. 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1084)

Website/Internet

- CNN Indonesia, “Kompaks: RUU PKS Ganti Nama Jadi TPKS, 85 Pasal Hilang”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903131110-32-689315/kompaks-ruu-pks-ganti-nama-jadi-tpks-85-pasal-hilang>, diakses 26 Juli 2022
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU”.

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38589/t/DPR+Setujui+RUU+TPKS+Menjadi+UU>, diakses 26 Juli 2022.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Fraksi PKS Tolak RUU TPKS Sebagai RUU Inisiatif DPR”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37038/t/Fraksi+PKS+Tolak+RUU+TPKS+Sebagai+RUU+Inisiatif+DPR>, diakses 28 Juli 2022
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses 28 Juli 2022.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses 28 Juli 2022.
- Executive Law Berkeley, “Overview of U.S. Sexual Harassment Law”. <https://www.st-yohanesbosco.org/content-422/discimus/youcat-257-apakah-merendahkan-martabat-perempuan-jika-hanya-laki-laki-saja-yang-boleh-ditahbiskan/>, diakses pada 31 Oktober 2022
- Gereja Katolik St. Yohanes Bosco, “YOUCAT 257 – Apakah Merendahkan Martabat Perempuan Jika Hanya Laki-Laki Saja yang Boleh Ditahbiskan”, <https://www.st-yohanesbosco.org/content-422/discimus/youcat-257-apakah-merendahkan-martabat-perempuan-jika-hanya-laki-laki-saja-yang-boleh-ditahbiskan/>, diakses pada 30 November 2022
- Gibran Maulana Ibrahim, “Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses 25 Juli 2022
- Gibran Maulana Ibrahim, “Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses 25 Juli 2022.
- Hanida, “Kesetaraan Gender dalam Agama Buddha”, <https://buddhazine.com/kesetaraan-gender-dalam-agama-buddha/>, diakses pada 30 November 2022
- Iva Nurdianah Azizah, “Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-Kepastian-Hukum.html>, diakses 23 Desember 2022.
- JawaPos.com, “Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Peradaban Baru”. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-peradaban-baru/?page=2>, diakses 25 Juli 2022
- JDIH BPK RI Database Peraturan, “Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses 16 Desember 2022.
- Jimmy Ramadhan Azhari, “5 Kasus Pelecehan Seksual yang Viral Dua Pekan Terakhir, Tiga Pelaku Tertangkap”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/10580911/5-kasus->

- [pelecehan-seksual-yang-viral-dua-pekan-terakhir-tiga-pelaku?page=all](#), diakses 25 Juli 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “martabat”. <https://kbbi.web.id/martabat>, diakses 29 Juli 2022
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “KemenPPPA dan Balek DPR-RI Mulai Pembahasan RUU TPKS”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3798/kemenpppa-dan-balek-dpr-ri-mulai-pembahasan-ruu-tpks>, diakses 16 Desember 2022.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Apa itu Kekerasan Seksual”. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses 25 Juli 2022
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 25 Juli 2022
- Komnas Perempuan, “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan per 21 Februari 2022 terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021.”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/823>, diakses pada 8 November 2022
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), “Apa sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?”. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, diakses 3 September 2022
- Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia”. <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488>, diakses 28 September 2022
- Redaksi, “Wahai Papua! Jangan Samakan Babi dengan Manusia”, <https://medgo.id/wahai-papua-jangan-samakan-babi-dengan-manusia/>, diakses pada 30 Oktober 2022
- Redline Indonesia Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan, “Kekerasan Berbasis Gender ‘KBG’”. <https://redlineindonesia.org/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>, diakses 5 Oktober 2022
- Rindi Nuris Velarosdela, “Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/20/15345491/polisi-periksa-kejiwaan-tersangka-pelaku-pelecehan-seksual-di-bekasi>, diakses 25 Juli 2022.
- Romauli Lubis, “Menyoal Kekerasan Seksual: Korban Berderet, Payung Hukum Masih Ngaret”. <https://infoanggaran.com/detail/menyoal-kekerasan-seksual-korban-berderet-payung-hukum-masih-ngaret>, diakses 25 Juli 2022

- Rumah Belajar, “Persamaan Derajat”, https://konten.smpn2ppu.sch.id/pkn/7/PERSAMAAN%20DERAJAT/MO_files/konten4.html, diakses 16 Desember 2022.
- Sasha Cohen, “A Brief History of Sexual Harassment in America Before Anita Hill”. <https://time.com/4286575/sexual-harassment-before-anita-hill/>, diakses pada 31 Oktober 2022
- Tim Hukumonline, “Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/?page=1>, diakses pada 2 November 2022
- UNHCR The UN Refugee Agency, “Gender-Based Violence”. <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>, diakses 2 September 2022
- Universitas Ahmad Dahlan, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>, diakses 25 Juli 2022
- Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses tanggal 24 Juli 2022
- Whatishumanresource.com, “Sexual Harassment, Different Countries”. <https://www.whatishumanresource.com/sexual-harassment-different-countries>, diakses pada 2 November 2022

